

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dengan populasi diperkirakan lebih dari 250 juta orang, Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Ini telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa dekade terakhir dan merupakan ekonomi terbesar di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Pertumbuhan ekonomi ini tidak dirasakan semua masyarakat sehingga masih terdapat dua masalah yang saling berkorelasi yaitu kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan dan kelaparan masih menjadi pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan.

Membahas mengenai kelaparan tidak terlepas dari membahas mengenai ketahanan pangan. Dimana ketahanan pangan merupakan konsep yang multidimensi, sehingga dalam ketahanan pangan juga harus membahas mengenai ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan juga pemanfaatan pangan. Dilihat dari data-datanya Indonesia sudah mampu untuk aspek ketersediaan pangan namun masih memiliki masalah dalam aspek akses terhadap pangan dan juga pemanfaatan pangan. Hal ini dirasakan bukan hanya didalam skala nasional namun juga salah satu bagian timur Indonesia yang merupakan wilayah rentan dan rawan pangan yaitu Provinsi NTT.

Dalam aspek ketersediaan pangan, Indonesia dan khususnya Provinsi NTT sudah mampu menyediakan pangannya dengan cukup namun akses terhadap pangan yaitu kemampuan jual-beli masyarakat yang dipengaruhi juga oleh faktor infrastruktur dan kemiskinan serta pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, layak dan bergizi masih belum optimal dirasakan masyarakat.

Masalah ketahanan pangan yang dirasakan sangat kompleks seperti kelaparan, malnutrisi, stunting, anemia pada ibu hamil, kemiskinan, kurangnya akses terhadap air dan sanitasi yang baik, dan juga akses terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan. Untuk itu dibentuklah sebuah kerangka Kerjasama untuk memperbaiki dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Kerjasama yang

bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global nomor 2 yaitu *Zero Hunger* atau tanpa kelaparan. Kerjasama ini dilakukan oleh Indonesia dan United Nation World Food Programme.

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan United Nation World Food Programme ini berada dibawah kerangka kerjasama *Indonesia Country Programme* Tahun 2016-2020 dan *Indonesia Country Strategic Plan* Tahun 2017-2020. Selama kerjasama internasional ini berlangsung terdapat empat program atau kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia dan WFP yaitu Peta Ketahanan dan Kerawananan Pangan Provinsi, Program Gizi Ibu dan Anak (KIA), Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS), *Cash and Voucher* dan juga Program tanggap bencana.

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan WFP menghasilkan perbaikan dan peningkatan dalam aspek-aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan juga pemanfaatan pangan serta pencapaian di beberapa indicator tujuan pembangunan berkelanjutan no 2 yaitu *Zero Hunger* atau Tanpa Kelaparan. Namun program-program tersebut belum mampu membantu Indonesia dan khususnya dalam skala kecil yaitu Provinsi NTT untuk mencapai *Zero Hunger* atau Tanpa Kelaparan karena belum semua indicator dapat terpenuhi standarnya. Hal ini dikarenakan terdapat tantangan dan hambatan selama kerjasama ini berlangsung. Tantangan yang dialami yaitu Meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan melalui program pengurangan kemiskinan dan peningkatan investasi dan infrastruktur, Akselerasi intervensi untuk pencegahan kekurangan gizi melalui pemantauan kurang gizi kronis atau stunting, Meningkatkan produksi pangan pokok local, Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai dimana nantinya akan dapat meningkatkan outcome gizi, Mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat, khususnya berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap kekeringan. Sedangkan hambatan yang dihadapi yaitu Komitmen Pemerintah Daerah, Anggaran Daerah, dan Pandemi Covid-19.

Cara penyelesaian tantangan dan hambatan dalam kerjasama WFP dan Indonesia dilakukan dengan cara persuasif yaitu diplomasi antara pihak WFP dan

Indonesia khususnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa di Provinsi NTT yang enggan melaksanakan komitmen kerjasama.

## 6.2 Saran

Berkaitan dengan implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan *World Food Programme* dimana menyelesaikan masalah ketahanan pangan menjadi fokus utama maka ketersediaan pangan harus dipenuhi sehingga tidak terjadi kelaparan, lalu pembenahan dalam akses terhadap pangan yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterjangkauan terhadap infrastruktur dalam upaya memperoleh pangan dan juga pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat harus segera diatasi. Program-program dan kegiatan kerjasama tidak akan menghasilkan output yang maksimal apabila terjadi kurangnya sinergi antar dua aktor yang bekerjasama ini. Persamaan kepentingan dan komitmen harus juga selaras dengan program-program yang dilaksanakan sehingga tantangan dan hambatan dan penyelesaian masalah kelaparan dan ketahanan pangan dapat diatasi dengan mudah. Terlebih visi dan misi kerjasama sudah tertuang dalam *Indonesia Country Programme* dan *Indonesia Country Strategic Plan* sehingga seharusnya masalah tata kelola pelaksanaan, penyerapan anggaran dan pemerataan program dapat dihindari. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap kerjasama antara Indonesia dan WFP untuk menghasilkan output yang lebih maksimal lagi, khususnya diperiode kerjasama selanjutnya yaitu 2021-2024 sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 2 nya di tahun 2030.